

Evaluasi Program Satu Desa Satu Produk di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus Tahun 2014-2017

Oleh:

Andre Faisol

14010112140030

Ilmu Pemerintahan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program satu desa satu produk (OVOP) yang dilaksanakan oleh DISNAKERPERINKOP dan UKM Kabupaten Kudus pada tahun 2014-2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat indikator evaluasi, yaitu *Input*, *Proses*, *Output*, dan *Outcome*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Data utama dalam penelitian ini adalah berupa data wawancara berdasarkan informan yang di anggap tahu dan paham tentang program yang dijalankan di Desa Loram Wetan, sedangkan untuk data penunjang berasal dari dokumen, internet, dan yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan survei menunjukkan program telah diterapkan berdasarkan rencana program. Sejak program dilaksanakan dari akhir tahun 2014-2017 sudah dapat mengakomodasi pengrajin tas di Desa Loram Wetan sebanyak 36 pengrajin tas. Dampak dari program yang dirasakan oleh pengrajin tas yang menjadi anggota Koperasi KURMA adalah adanya jaringan usaha untuk saling berbagi informasi yang bertujuan saling membantu menyelesaikan permasalahan pengrajin yang sedang dihadapi serta adanya daya serap tenaga kerja bagi tenaga kerja ahli menjahit.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika pada empat indikator evaluasi ditemukan bahwa pada indikator input kurang baik dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya permodalan. Pada penerapan Program OVOP di Desa Loram Wetan tahun 2014-2017 terdapat dua kendala yaitu, kurang tersedianya tenaga kerja menjahit dan kurangnya permodalan untuk menunjang produksi.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, OVOP

***Evaluation One Village One Product at Loram Wetan Village Kudus Regency
Year of 2014-2017***

By:

Andre Faisol

14010112140030

Government Science

Abstract

This study was aimed to evaluate one village one product program (OVOP) that is implemented by DISNAKERPERINKOP and UKM Kudus Regency in 2014-2017. The theory that uses in this study is four evaluation indicators which are: Indicator Input, Proses, Output, and Outcome. This study used a qualitative method with descriptive analysis. The primary data in this study derived from interviews data from informants who considered have knowledge about program that implemented at Loram Wetan Village, while the secondary data derived from documents, internet, and anything else that relate to this study.

The survey shows that the program has been well implemented accordance to the program planning. Since 2014-2017 year the implement program already can accommodate 36 craftmans groups at Loram Wetan Village. Impact of this program to the craftmans that perceived their business network help the craftmans to share information about how to solve problem they had also cooperate each other and the program have potency to absorb labor with tailor mastery.

Based on survey result this study conclusion is from four evaluation indicators show if indicator input not well implemented caused lack of human resource and lack of capital. OVOP Program that implemented at Loram Wetan Village in 2014 shows two obtacles which are: lack of labor with tailor mastery and lack of capital resouce to increase the production.

Keyword: Evaluation, Program, OVOP

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini banyak daerah yang mempromosikan diri untuk mendatangkan investor yang pada harapannya investor tersebut berinvestasi pada daerah yang dipromosikan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri yang lahir dari investasi. Selain itu sebagai esensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat pemerintah daerah di setiap kabupaten dan kota mengeluarkan kebijakan atau program yang bertujuan meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Kabupaten Kudus sendiri melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan melakukan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah industri yang dibuat oleh perorangan atau badan usaha dari Warga Negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat tiga jenis usaha yakni tingkat mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan tingkatan tersebut terdapat kriteria, pada usaha mikro kriterianya adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang asetnya tidak lebih dari 50 juta dan omzetnya tidak lebih dari 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah usaha milik perorangan atau badan usaha dan bukan anak perusahaan dan cabang dari perusahaan menengah atau besar dengan kriteria aset sebesar 50 juta sampai 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang

dilakukan perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil. Usaha besar dengan kriteria aset: sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet: sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar¹.

Usaha Mandiri Kecil dan Menengah mampu menjadi pilar ekonomi sebuah negara. Berdasarkan Data dari BPS 2008 menyebutkan bahwa koperasi dan UMKM merupakan populasi pelaku usaha yang sangat besar, mencapai 51,2 juta (99,98 persen) dari jumlah unit usaha dan (49,8 juta) yang tersebar di seluruh wilayah di semua sektor usaha. UMKM mampu menciptakan kesempatan kerja mencapai 91,8 juta orang (97,33 persen) dari total kesempatan kerja. Dengan kontribusi dalam PDB nasional mencapai Rp 2.121,3 triliun (53,6 persen) dari total PDB. Sedangkan kontribusi ekspor mencapai Rp 142,8 triliun (20 persen) dari total ekspor nonmigas dan investasi fisik koperasi dan UKM mencapai Rp 462,01 triliun (46,9 persen)².

Pada perkembangan UMKM dimulai setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dinilai UMKM atau yang sering disebut UKM lebih kokoh dalam menghadapi krisis global yang melanda Indonesia. Krisis moneter dan krisis keuangan yang mengguncang Indonesia pada tahun 1998 serta 2008, sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian Tanah Air. Namun, tidak semua sektor terguncang kala itu. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tahan terhadap guncangan krisis yang melanda. Pada masa krisis ekonomi tahun 1997 sektor UMKM

¹ Kriteria UMKM, di akses dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129 pada tanggal 02 Desember 2014 pukul 19.38

² Koperasi dan UKM Jadi Pilar Utama Perekonomian, di akses dari

<http://news.okezone.com/read/2010/07/14/367/352821/koperasi-dan-ukm-jadi-pilar-utama-perekonomian> pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 16.47

diketahui berjumlah 39.765.110 unit dan pada tahun 1998 berkurang 7,42 persen atau sebanyak 36.813.578 unit. Berdasarkan data dari BPS tersebut jumlah penurunan unit UMKM tergolong tidak signifikan mengalami penurunan pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 sehingga diyakini UMKM mampu menjadi sebuah poros ekonomi negara. Bahkan pada tahun 2012 UMKM sudah mengalami berkembang yang pesat yang berjumlah 56.534.592 unit³.

Di Kabupaten Kudus sendiri terdapat banyak Perusahaan/Usaha dari mikro hingga besar. Pada sektor industri mikro hingga kecil berjumlah 10.954 yang sedikitnya menyerap tenaga kerja 70.842 orang. Jumlah tersebut hampir setengah dari serapan tenaga kerja oleh 88 industri besar di Kudus yang berjumlah 142.569 orang. Dari jumlah tersebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak dan mampu menyokong perekonomian yang ada di Kabupaten Kudus⁴.

Untuk meningkatkan jumlah usaha-usaha tersebut Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM mencanangkan Program *One Village One Product* dengan berbasiskan koperasi yang berdasarkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 518/23546 tahun 2011 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan OVOP berbasis Koperasi yang di muat dalam rencana strategis 2013-2018 Dinas Tenaga

Kerja, Perindustri, Koperasi, dan UKM. Program ini ditujukan untuk mengakomodasi para pelaku UMKM agar usahanya berkembang. Selain itu program ini dilakukan secara berantai dari desa satu ke desa lainnya dengan mendampingi dan mengembangkan usaha yang modalnya dibawah 50 Juta rupiah. Ketika usahanya sudah berkembang kearah menengah maka akan dilepas supaya mandiri setelah itu usaha lain yang akan mendapat dampingan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Program tersebut sudah berjalan selama 5 tahun dan selama 5 tahun tersebut sudah menyokong beberapa desa. Desa yang telah disokong oleh pemerintah yaitu Desa Padurenan (sentra bordir dan konfeksi), dan Desa Loram Wetan (sentra produksi tas). Program Satu Desa Satu Produk ini masih terus berjalan dengan memperluasnya ke desa-desa sekitar dari desa yang telah menjadi produsen-produsen tadi.⁵

Pada dasarnya latar belakang munculnya gerakan OVOP serta konsep dasarnya dapat disampaikan dalam tiga hal, yaitu: pertama, adanya konsentrasi dan kepadatan populasi di perkotaan sebagai akibat pola urbanisasi dan menimbulkan menurunnya populasi penduduk di pedesaan. Kedua, untuk dapat menghidupkan kembali gerakan dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Ketiga, mengurangi ketergantungan masyarakat desa yang terlalu tinggi terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

³ Data UMKM Tahun 1997,1998,2012, di akses dari [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=17: data-umkm&Itemid=93](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=17:data-umkm&Itemid=93) pada tanggal 20 Januari 2015 pukul 07.51

⁴ Jumlah Industri Mikro, di akses dari <http://www.promojateng-pemprovjateng.com/ambildaerah.php?kota=K>

udus pada tanggal 02 Desember 2014 pukul 20.13

⁵ Desa OVOP Berbasis Koperasi, di akses dari <http://berita.suaramerdeka.com/pemkab-kudus-perluas-desa-ovop-berbasis-koperasi/> pada tanggal 26 Oktober 2014 pukul 15.23

Berdasarkan Program Satu Desa Satu Produk yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi Program Satu Desa Satu Produk tersebut untuk diketahui tingkat keberhasilan program. Karena diketahui sejak program ini dijalankan mulai tahun 2012 sampai sekarang tahun 2018 sudah ada beberapa desa OVOP yang berhasil berjalan dengan program ini. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Program Satu Desa Satu Produk yang ada di Kabupaten Kudus khususnya di Desa Loram Wetan.

Adapun penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk mengevaluasi Program satu desa satu produk yang ada di Kabupaten Kudus. Akan tetapi, juga untuk mengetahui strategi apa yang akan digunakan pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan program satu desa satu produk yang berbasis koperasi dalam mengakomodasi pelaku UMKM. Diketahui bahwa Kabupaten Kudus memiliki industri rokok yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Akan tetapi, pemerintah berusaha mendorong masyarakat untuk lebih produktif di perindustrian mikro dan kecil. Berdasarkan ketertarikan penulis terhadap berlanjutnya program yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus seperti yang telah dijelaskan penulis membuat sebuah penelitian dengan judul “EVALUASI PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK DI DESA LORAM WETAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014-2017”

2. Landasan Teori

2.1. Evaluasi

Dalam sebuah kebijakan terdapat beberapa tahapan yaitu, Perencanaan,

Implementasi, dan Evaluasi. Evaluasi sendiri adalah kegiatan menilai kebijakan atau program yang telah di implementasi untuk menjadi ukuran dalam tercapai atau tidaknya kebijakan yang dijalankan.

Seperti apa yang di jelaskan William N. Dunn dalam “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” evaluasi dalam analisa kebijakan secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Sedangkan menurut Samodra Wibawa evaluasi merupakan kegiatan dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, kontrol dan pemantauan. Secara umum evaluasi kebijakan publik menurut Samodra Wibawa (1993:10-11), memiliki empat fungsi yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Jadi evaluasi adalah kegiatan menilai atau mengukur sebuah kebijakan dan program dengan melakukan pengawasan, monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil capaian kebijakan tersebut diterapkan yang nantinya evaluasi mampu memberikan rekomendasi kepada sebuah program dan kebijakan (Nugroho, 2006: 156).

Evaluasi selain menjadi sebuah tolak ukur juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi umum evaluasi terbagi menjadi tiga yaitu, pertama, memberikan informasi sebuah capaian program atau kebijakan. Kedua, memberikan kritikan kepada kebijakan. Ketiga, memberikan sebuah rekomendasi rumusan masalah pada penyusunan ulang kebijakan. Dunn dalam bukunya (Dunn, 2003: 610) juga menyatakan bahwa evaluasi memiliki sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kelayakan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternative kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

2.2. Pengukuran Evaluasi

Terdapat berbagai macam pengukuran evaluasi dalam mengevaluasi sebuah kebijakan atau program. Hal

tersebut dikarenakan terdapat variasi dalam tipe evaluasi seperti evaluasi kecocokan, efektivitas, dan efisiensi. Meskipun tipe evaluasi bervariasi akan tetapi secara garis besar pengukuran evaluasi mengacu pada empat indikator pokok.

Menurut Bridgman dan Davis (2000:130) pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1) indicator input, (2) indicator process, (3) indicator outputs dan (4) indicator outcomes. Berdasarkan indikator pokok tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator input, indikator ini adalah pengukuran terhadap kesesuaian sumber daya yang digunakan dalam sebuah program kebijakan. Ruang lingkup indikator input termasuk sumber daya manusia, daya dukung infrastruktur dan sumber daya finansial.
2. Indikator proses, menekankan pada penilaian atau pengukuran pada sejauh mana program tersebut dilaksanakan dan bagaimana kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap rencana kegiatan.
3. Indikator outputs (hasil), menekankan pada penilaian terhadap hasil capaian dari program kebijakan yang dilaksanakan.
4. Indikator outcomes (dampak), lebih menekankan kepada dampak atau manfaat program kebijakan yang diterima kepada kelompok sasaran.

2.3. Koperasi

Koperasi di Indonesia pada awalnya tidak terbentuk secara langsung akan tetapi berdasarkan penderitaan masyarakat akibat sistem kapitalisme di masa Pemerintah Hindia-Belanda. Pada tahun 1896 salah satu Pamong Praja dari Purwokerto yaitu Patih R.Aria Wiria Atmaja mendirikan Bank untuk membantu pegawai negeri yang terjebak pinjaman dengan bunga tinggi. Berkat De Wolff van Westerde yang

mengubah Bank Pertolongan Tabungan tersebut menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian karena petani semakin menderita pada masa Hindia-Belanda. Diubahnya Bank tersebut menjadikan cikal koperasi di masa tersebut dengan mendirikan Koperasi Kredit Padi di lumbung-lumbung desa untuk membantu petani di musim paceklik.

Berdasarkan tujuan didirikannya sebuah koperasi, koperasi memiliki berbagai jenis berdasarkan fungsi dan tujuan, yaitu:

1. Koperasi pembelian/ pengadaan/ konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir.
2. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen.
3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya.

2.4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha yang didirikan oleh badan atau orang yang bertujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan kriteria berdasarkan aset dan omzet. Bentuk dan Kriteria usaha tersebut diatur dalam UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Berdasarkan tingkatan tersebut terdapat kriteria, pada usaha mikro

kriterianya adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang asetnya tidak lebih dari 50 juta dan omzetnya tidak lebih dari 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah usaha milik perorangan atau badan usaha dan bukan anak perusahaan dan cabang dari perusahaan menengah atau besar dengan kriteria aset sebesar 50 juta sampai 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil. Usaha besar dengan kriteria aset: sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet: sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

3. Metoda

Dalam melakukan penelitian Evaluasi Program Satu Desa Satu Produk di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus ini diperlukan sebuah metodologi. Untuk melakukan penelitian tersebut, metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Sumber data untuk penelitian ini, adalah berupa data primer. Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumber yang terlibat dan memahami masalah penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan, yaitu sumber data dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk data sekunder akan diperoleh dari dokumen dan studi kepustakaan dari Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM tersebut.

4. Hasil Penelitian

a. Indikator *Input*

Pada pelaksanaan program Satu Desa Satu Produk di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus tahun 2014-2017 tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan sumber daya manusia pembina dari DISNAKERPERINKOP dan UKM Kabupaten Kudus, kurangnya dukungan permodalan pada Koperasi KURMA Loram Wetan karena hanya bersumber pada iuran anggota, kurangnya sarana dan prasarana mesin jahit dalam melakukan kegiatan produksi.

b. Indikator *Proses*

Pada pelaksanaan Program Satu Desa Satu Produk di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus tahun 2014-2017 berjalan cukup baik. Hal ini karena DISNAKERPERINKOP dan UKM Kabupaten Kudus melaksanakan program sesuai dengan faktor pendukung yaitu sudah adanya produksi tas yang sama dalam wilayah Desa Loram Wetan meskipun tidak berdasarkan adanya ketersediaan bahan baku dasar di desa tetapi tidak menghambat berjalannya program. Serta adanya dukungan dari dinas dalam pemasaran produk seperti pameran atau EXPO mendorong produk tas Desa Loram Wetan menjadi produk unggulan. Selain itu adanya sebuah kemandirian dari para pengusaha dengan mengadakan program kredit mesin jahit untuk anggota koperasi yang membutuhkan serta menawarkan program jaminan kesehatan untuk menarik tenaga kerja merupakan sebuah komitmen yang baik dari sasaran program OVOP di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus.

c. Indikator *Output*

Hasil capaian dari Program Satu Desa Satu Produk di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus tahun 2014-2017 cukup baik. Hal ini dibuktikan adanya penambahan jumlah anggota atau pengusaha di koperasi yang bertambah 18

anggota sejak didirikannya kelembagaan koperasi KURMA di Desa Loram Wetan yang bertujuan untuk ikut andil dalam kegiatan produksi tas guna untuk menaikkan kesejahteraan mereka sendiri dan sesama pengusaha tas. Selain itu terserapnya lebih dari 100 tenaga kerja ahli menjahit di Desa Loram Wetan menjadi salah satu bukti hasil dilaksanakan Program Satu Desa Satu Produk di Desa Loram Wetan.

d. Indikator *Outcome*

Dampak positif yang diberikan dari Program OVOP di Desa Loram Wetan kepada sasaran target cukup baik. Hal ini dibuktikan adanya perubahan kepada sasaran program atau pengusaha dimana sebelum adanya program Satu Desa Satu Produk di Desa Loram Wetan Tahun 2014-2017 pengusaha tidak ada jaringan usaha atau wadah diskusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Setelah adanya program OVOP para pengusaha lebih mudah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi dengan saling berbagi informasi.

5. Simpulan

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendorong produksi tas di Desa Loram Wetan sebagai produk unggulan pedesaan atau OVOP dengan pendekatan koperasi merupakan keputusan yang tepat hal ini karena sudah adanya kesamaan produksi di desa tersebut. Dalam pelaksanaan program OVOP di Desa Loram Wetan Kabupten Kudus Tahun 2014-2017 sudah berjalan cukup baik akan tetapi dalam indikator *input* kurang baik. Sedangkan untuk indikator *proses*, *output*, dan *outcome* sudah baik.

Pelaksanaan program Satu Desa Satu Produk di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus tahun 2014-2017 memiliki dua kendala utama yaitu kekurangan tenaga kerja ahli yang di karenakan terserap oleh perusahaan besar

dan terlalu banyaknya pengusaha tas serta kendala yang kedua minimnya permodalan untuk kegiatan produksi.

Tinjauan Pustaka

Bridgman, P. and Davis, G. (2000). *The Australian Policy Handbook*. Australia: Allen & Unwin.

Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kasromi, (2010). *Evaluasi Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Dalam Memajukan sektor UKM di Kota Semarang*, Skripsi Strata 1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP.

Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho. Riant. D. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Data UMKM Tahun 1997,1998,2012, di akses dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=17:data-umkm&Itemid=93 pada tanggal 20 Januari 2015 pukul 07.51

Desa OVOP Berbasis Koperasi, di akses dari [http://berita.suaramerdeka.com/pe-mkab-kudus-perluas-desa-ovop-](http://berita.suaramerdeka.com/pe-mkab-kudus-perluas-desa-ovop-berbasis-koperasi/)

berbasis-koperasi/ pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 15.23

Jumlah Industri Mikro, di akses dari <http://www.promojateng-pemprovjateng.com/ambildaerah.php?kota=Kudus> pada tanggal 02 Desember 2014 pukul 20.13

Koperasi dan UKM Jadi Pilar Utama Perekonomian, di akses dari <http://news.okezone.com/read/2010/07/14/367/352821/koperasi-dan-ukm-jadi-pilar-utama-perekonomian> pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 16.47

Kriteria UMKM, di akses dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129 pada tanggal 02 Desember 2014 pukul 19.38